



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12-A TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang**
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 39);
 - b. bahwa usulan pergeseran anggaran telah mendapat persetujuan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/1000/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/ 13 /2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009, dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : 910/045/Pim DPRD/2009 tanggal 6 April 2009, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 35).
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor) yang diubah adalah :
 - 1) Belanja modal kode rekening 1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.
 - 2) Belanja pegawai kode rekening 1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01. dan belanja barang dan jasa kode rekening 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.
 - 3) Belanja modal kode rekening 1.02.1.02.01.16.08.5.2.3.
 - 4) Belanja modal kode rekening 1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.
 - 5) Belanja pegawai kode rekening 1.16.1.20.08.16.03.5.2.1.

- 6) Belanja modal kode rekening 1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.
 - 7) Belanja pegawai kode rekening 1.19.1.19.02.15.10.5.2.1. dan belanja barang dan jasa kode rekening 1.19.1.19.02.15.10.5.2.2.
 - 8) Belanja modal kode rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.
 - 9) Belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.
 - 10) Belanja pegawai kode rekening 1.20.1.20.04.15.05.5.2.1. dan belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.
 - 11) Belanja tidak langsung kode rekening 1.20.1.20.05.5.1.
 - 12) Belanja modal kode rekening 1.11.1.11.01.02.09.5.2.3.
 - 13) Belanja modal kode rekening 1.26.1.26.01.02.03.5.2.3.
 - 14) Belanja modal kode rekening 1.02.1.02.01.26.36.5.2.3.
 - 15) Belanja pegawai kode rekening 1.02.1.02.01.22.04.5.2.1. dan belanja barang dan jasa kode rekening 1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.
 - 16) Belanja barang dan jasa kode rekening 1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.
 - 17) Belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.
 - 18) Belanja pegawai kode rekening 1.20.1.20.05.17.15.5.2.1. dan belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.
 - 19) Belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.05.17.36.5.2.1.
 - 20) Belanja pegawai kode rekening 1.20.1.20.06.5.1.1.
 - 21) Belanja modal kode rekening 1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.
 - 22) Belanja modal kode rekening 1.20.1.20.26.02.09.5.2.3.
 - 23) Belanja kegiatan kode rekening 1.01.1.01.16.135.
 - 24) Belanja kegiatan kode rekening 1.01.1.01.16.105.
 - 25) Belanja kegiatan kode rekening 1.01.1.01.18.15.
 - 26) Belanja kegiatan kode rekening 1.19.1.19.01.21.08.
 - 27) Belanja kegiatan kode rekening 1.19.1.19.01.23.01.
 - 28) Belanja kegiatan kode rekening 1.02.1.02.01.16.30. dan 1.02.1.02.01.16.31 dan 1.02.1.02.01.23.07.
 - 29) Belanja kegiatan kode rekening 1.06.1.06.01.21.24.
 - 30) Belanja kegiatan kode rekening 1.08.1.08.01.20.09. dan 1.08.1.08.01.20.10.
 - 31) Belanja kegiatan kode rekening 1.12.1.11.01.18.08. dan 1.11.1.11.01.18.08.
 - 32) Belanja kegiatan kode rekening 1.14.1.13.01.16.10 dan 1.14.1.13.01.16.11. dan 1.14.1.13.01.17.14.
 - 33) Belanja kegiatan kode rekening 1.15.1.15.01.16.12. dan 1.15.1.15.01.16.13.
 - 34) Belanja kegiatan kode rekening 1.20.1.20.03.02.05. dan 1.20.1.20.03.20.22. dan 1.20.1.20.03.20.23.
 - 35) Belanja kegiatan kode rekening 1.20.1.20.05.17.34. dan 1.20.1.20.05.17.35.
 - 36) Belanja bantuan sosial kode rekening 1.20.1.20.00.5.1.5.
 - 37) Belanja kegiatan kode rekening 2.01.2.01.01.02.09. dan 2.01.2.01.01.15.10. dan 2.01.2.01.01.15.11.
 - 38) Belanja kegiatan kode rekening 2.06.2.07.01.19.09. dan 2.06.2.07.01.19.10. dan 2.07.2.07.01.19.16. dan 2.07.2.07.01.19.07.
 - 39) Belanja barang dan jasa kode rekening 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.
2. Perincian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 39) tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 27 April 2009

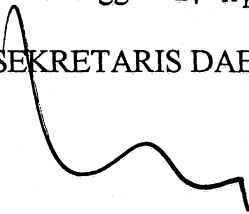
BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 12.A

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA,
 ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA, ANTAR JENIS BELANJA DAN ANTAR KEGIATAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

KODE REKENING	URAIAN	JML SEBELUM PERGESERAN	JML SETELAH PERGESERAN	KETERANGAN PERGESERAN
1	2	3	4	5
1.01.01. 1.01.1.01.16.108.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga <i>Pendampingan (BOP) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) bidang pendidikan</i>	200.000.000	200.000.000	
5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000	200.000.000	
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	200.000.000	200.000.000	
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	200.000.000	200.000.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja modal pengadaan handycam.
	- Belanja modal pengadaan kamera digital untuk dokumentasi kegiatan DAK	6.500.000	6.500.000	
	- Honorarium Panitia Pelaksana	8.000.000	16.000.000	
	- Honorarium Tim Monitoring	16.785.000	16.425.000	
	- Honorarium Dirlap	10.800.000	12.150.000	
	- Honorarium Tim PPP	9.720.000	15.390.000	
	- Honorarium Tim Pengawas Pengadaan Barang/Jasa	5.490.000	-	
	- Honorarium Tim Tekins (Pendamping Pemb/Rehabilitasi)	16.470.000	13.725.000	
	- Honorarium Tim Penguji	1.400.000	1.400.000	
	- Uang lembur persiapan dan pelaporan	16.464.000	21.042.000	
	- Belanja alat tulis	21.230.000	31.574.000	
	- Belanja bantuan pembuatan IMB	23.600.000	-	
	- Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas	9.786.000	7.339.500	
	- Belanja dokumentasi	600.000	750.000	
	- Belanja dekorasi	300.000	300.000	
	- Belanja jasa pemeliharaan	990.000	990.000	
	- Belanja cetak dan foto copy	7.303.000	8.990.500	
	- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000	900.000	
	- Belanja makanan dan minuman harian	20.982.000	20.350.000	
	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000	8.424.000	
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000	17.750.000	

1	2	3	4	5
1.02.01	Dinas Kesehatan			
1.02.1.02.01.22.01.	Penyempromten/fogging sarang nyamuk			
5.2.1.	Belanja Pegawai	212.500.000	212.500.000	Pergeseran rincian obyek belanja, pada obyek belanja honorarium PNS dan
5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.600.000	46.600.000	Obyek belanja perjalanan dinas.
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000	11.100.000	1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan, dari Rp 11.100.000,- menjadi
	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000	8.520.000	Ro 8.520.000,-
	- Belanja transportasi dan akomodasi peserta/pelaks.kegiatan	8.520.000	8.520.000	
5.2.1.01.05.	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta/ Pelaksana Kegiatan	2.580.000	2.580.000	2) Belanja transportasi dan akomodasi peserta/pelaksana kegiatan, dari
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.744.000	34.744.000	Rp 0,- menjadi Rp 2.588.000,-
5.2.1.02.02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	34.744.000	34.744.000	3) Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dari Rp 0,- menjadi Rp 5.444.000,-
5.2.1.03.	Uang Lembur	756.000	756.000	4) Belanja perjalanan dinas luar daerah, dari Rp 7.244.000,- menjadi Rp 1.800.000,-
5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	756.000	756.000	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.900.000	165.900.000	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	149.647.500	149.647.500	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.325.500	1.325.500	
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	148.322.000	148.322.000	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	
5.2.2.03.24.	Belanja jasa pemeliharaan	1.500.000	1.500.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.038.500	1.038.500	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	480.000	480.000	
5.2.2.06.02.	Belanja pengandaan	558.500	558.500	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.190.000	2.190.000	
5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan Minuman tambahan	2.190.000	2.190.000	
5.2.2.13.	Belanja Pakaiain Kerja	4.280.000	4.280.000	
5.2.2.13.01.	Belanja pakaiain kerja lapangan	4.280.000	4.280.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.244.000	7.244.000	
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	-	5.444.000	
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	7.244.000	1.800.000	
1.02.1.02.01.16.08	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat generik Esensial			
5.2.3.	Belanja Modal	151.255.000	151.255.000	Pergeseran antar obyek belanja,
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.700.000	4.700.000	antara obyek belanja belanja modal
5.2.3.11.07.	Belanja modal pengadaan AC	4.700.000	4.700.000	pengadaan mebelair, belanja modal
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.250.000	9.250.000	pengadaan peralatan dapur, dan
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.700.000	8.700.000	belanja modal pengadaan alat-alat
5.2.3.12.08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	550.000	550.000	laboratorium.

1	2	3	4	5
5.2.3.13. 5.2.3.13.01. 5.2.3.13.03. 5.2.3.13.11. 5.2.3.14. 5.2.3.14.05. 5.2.3.14.06. 5.2.3.20. 5.2.3.20.01. 5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Belanja modal pengadaan meja kursi kerja Belanja modal pengadaan meja kursi tamu Belanja modal almari kayu Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja modal pengadaan kulkas Belanja modal pengadaan rak piring Belanja Modal pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	11.717.500 6.317.500 1.500.000 3.900.000 4.750.000 4.000.000 750.000 120.837.500 21.000.000 99.837.500	10.017.500 5.517.500 2.000.000 2.500.000 - - - 127.287.500 - 127.287.500	
1.06.01. 1.06.1.06.01.02.09.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			
5.2.3. 5.2.3.12. 5.2.3.12.02.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - Persiapan dan administrasi - Pengadaan PC	70.000.000 36.150.000 3.500.000 32.650.000	70.000.000 36.150.000 3.500.000 32.650.000	
5.2.3.12.03. 5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan komputer note book Belanja modal pengadaan printer - Pengadaan printer inkjet - Pengadaan printer dot matrik	24.000.000 9.850.000 6.750.000 3.100.000	24.000.000 9.850.000 3.000.000 6.850.000	
1.16.1.20.08 1.16.1.20.08.16.03.	Dinas Pelayanan Terpadu Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	57.500.000	57.500.000	
5.2.1. 5.2.1.01. 5.2.1.01.01. 5.2.1.01.04. 5.2.1.02. 5.2.1.02.01. 5.2.1.03. 5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta/Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Uang lembur Uang lembur PNS	20.609.000 11.965.000 3.165.000 8.800.000 7.500.000 7.500.000 1.144.000 1.144.000	20.609.000 11.965.000 3.165.000 8.800.000 7.500.000 7.500.000 1.144.000 1.144.000	
				Pergeseran rincian item rincian obyek belanja, pada rincian obyek belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan.
				1) Pengadaan PC, dari volume 5 unit, harga satuan Rp 6.530.000,- menjadi volume 4 unit, harga satuan Rp 8.162.500,- 2) Pengadaan printer inkjet, dari volume 9 unit, harga satuan Rp 750.000,- menjadi volume 4 unit, harga satuan Rp 750.000,- 3) Pengadaan printer dot matrik, dari volume 1 unit, harga satuan Rp 3.100.000,- menjadi volume 1 unit harga satuan Rp 6.850.000,-

1	2	3	4	5
5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01. 5.2.2.01.04. 5.2.2.01.09. 5.2.2.06. 5.2.2.06.01. 5.2.2.06.02. 5.2.2.11. 5.2.2.11.02. 5.2.2.15. 5.2.2.15.01. 5.2.2.15.02.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya Belanja dokumentasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.891.000 2.037.000 1.831.800 90.000 115.200 19.161.000 18.750.000 411.000 1.008.000 1.008.000 14.685.000 1.465.000 13.220.000	36.891.000 2.037.000 1.831.800 90.000 115.200 19.161.000 18.750.000 411.000 1.008.000 1.008.000 14.685.000 1.465.000 13.220.000	
1.19.02. 1.19.1.19.02.02.05. 5.2.3. 5.2.3.03. 5.2.3.03.03.	Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Station Wagon - Belanja modal pengadaan mobil on the road - Pengadaan lampu sirene - Pengadaan pesawat rig - Pengecatan mobil - Pembuatan logo - Honor panita pengadaan barang - Honor panita pemeriksa barang - Honor pengelola kegiatan - Alat tulis kantor - Administrasi lelang/tender - Pengumuman pemenang lelang - Fotocopy - Makanan dan minuman - Perjalanan dinas luar daerah	175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 143.100.000 7.500.000 6.117.000 8.600.000 1.000.000 2.012.500 1.610.000 650.000 250.500 1.100.000 500.000 120.000 420.000 2.020.000	175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 173.000.000 - - - - 805.000 805.000 - - 300.000 - 90.000 -	Pergeseran rincian obyek belanja, pada rincian obyek belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat station darat.
1.19.1.19.02.15.12. 5.2.1.	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingk. Dim Rangka Pengawalan dan Pengamanan Keg.Pemda Kab.Tegal Belanja Pegawai	150.000.000 128.632.500	150.000.000 128.632.500	Pergeseran rincian obyek belanja, pada

1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Honorarium PNS	126.112.500	126.112.500	rincian obyek belanja transportasi dan akomodasi, serta obyek belanja bahan bakar minyak/gas, dengan menambah item rincian obyek kegiatan protokoler Pemda.
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.262.500	3.262.500	
5.2.1.01.04.	Belanja transportasi dan akomodasi	122.850.000	122.850.000	
5.2.1.03.	Uang Lembur	2.520.000	2.520.000	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.520.000	2.520.000	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.367.500	21.367.500	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.659.500	20.659.500	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	362.500	362.500	
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	20.130.000	20.130.000	
5.2.2.01.09.	Belanja dokumentasi	167.000	167.000	
5.2.2.06.	Belanja cetak dan pengadaan	300.000	300.000	
5.2.2.06.02.	Belanja pengadaan	300.000	300.000	
5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman	408.000	408.000	
5.2.2.11.02.	Belanja snack rapat	408.000	408.000	
1.20.03.	Sekretariat Daerah			
1.20.1.20.03.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	750.000.000	750.000.000	
5.2.3.	Belanja Modal	750.000.000	750.000.000	
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000	750.000.000	
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	750.000.000	750.000.000	
	- Biaya persiapan dan administrasi	30.000.000	13.500.000	
	- Biaya pelaksanaan	720.000.000	736.500.000	
1.20.04.	Sekretariat DPRD			
1.20.1.20.04.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	40.000.000	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai habis	40.000.000	40.000.000	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000	40.000.000	
1.20.1.20.04.15.05.	Kegiatan Reses	900.000.000	900.000.000	
5.2.1.	Belanja Pegawai	484.860.000	484.860.000	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.110.000	7.110.000	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.110.000	7.110.000	

1	2	3	4	5
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	477.750.000	477.750.000	peserta/pelaksana kegiatan, belanja
5.2.1.02.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/harasumber	22.750.000	22.750.000	dokumentasi, belanja sewa gedung/
5.2.1.02.02.	Belanja transportasi dan akomodasi peserta/pelaks keg.	455.000.000	455.000.000	kantor/tempat, belanja sewa perlengkapan
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.140.000	415.140.000	dan peralatan kantor, belanja sewa
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.495.000	16.495.000	sound system, belanja makanan dan
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis Kantor	2.845.000	2.845.000	minuman rapat, 44 x 2 reses, menjadi
5.2.2.01.09.	Belanja dokumentasi	13.650.000	13.650.000	45 reses1 dan 43 rese 2.
5.2.2.03.	Belanja jasa kantor	600.000	600.000	
5.2.2.03.13.	Belanja dekorasi	600.000	600.000	
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.400.000	36.400.000	
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	36.400.000	36.400.000	
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	54.600.000	54.600.000	
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	31.850.000	31.850.000	
5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	22.750.000	22.750.000	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	296.205.000	296.205.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	296.205.000	296.205.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000	10.840.000	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.840.000	10.840.000	
1.26.01.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah			
1.26.1.26.01.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor			
5.2.3.	Belanja Modal	1.500.000.000	1.500.000.000	Pergeseran rincian obyek belanja,
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/	1.500.000.000	1.500.000.000	pada rincian obyek belanja modal
	Pembelian Bangunan			pengadaan konstruksi/pembelian
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/	1.500.000.000	1.500.000.000	bangunan :
	Pembelian Bangunan			1) Belanja modal pengadaan gedung
	Biaya Umum (Persiapan dan Administrasi)	25.300.000	25.300.000	Perpustakaan Daerah, dari
	Pelaksanaan	1.474.700.000	1.474.700.000	Rp 1.474.700.000,- menjadi
	- Belanja modal pengadaan gedung Perpustakaan Daerah	1.474.700.000	1.424.700.000	Rp 1.424.700.000,-
	- Belanja jasa konsultan pengawas	-	50.000.000	2) Belanja Jasa konsultan pengawas,
				dari Rp 0,- menjadi Rp 50.000.000,-
1.02.01.	Dinas Kesehatan			
1.02.01.1.02.01.26.3.	Pembangunan Rumah Sakit Type D Suradadi			
5.2.3.	Belanja Modal	500.000.000	500.000.000	Pergeseran antar obyek belanja, antara
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.000.000	198.858.750	obyek belanja modal pengadaan perlengkapan
5.2.3.11.02.	Belanja modal pengadaan almari	150.000.000	150.000.000	kantor dengan obyek belanja modal
5.2.3.11.07.	Belanja modal pengadaan AC	-	48.858.750	pengadaan mebelair :
				1) Belanja modal pengadaan perlengkapan

1	2	3	4	5
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	97.576.800	97.576.800	kantor, dari Rp 150.000.000,- menjadi Rp 198.858.750,-
5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	62.506.500	62.506.500	
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	29.295.000	29.295.000	2) Belanja modal pengadaan mebelair, dari Rp 252.423.200,- menjadi Rp 203.564.450.000,-
5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	5.775.300	5.775.300	
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	252.423.200	203.564.450	
5.2.3.13.01.	Belanja modal pengadaan meja kursi kerja	222.090.200	173.231.450	
	- Belanja modal pengadaan meja kursi kerja	200.000.000	151.141.250	
	- Biaya umum (persiapan dan administrasi)	22.090.200	22.090.200	
5.2.3.13.03.	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu	30.333.000	30.333.000	
1.02.01.	Dinas Kesehatan			
1.02.01.1.02.01.22.04.	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	519.530.000	519.530.000	
5.2.1.	Belanja Pegawai	210.662.500	210.662.500	a. Pergeseran antar rincian obyek belanja, pada obyek belanja honorarium PNS,
5.2.1.01.	Honorarium PNS	204.962.500	204.530.500	1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan, dari Rp 8.640.000,- menjadi Rp 7.920.000,-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000	7.920.000	2) Honorarium tim pengadaan dan pemeriksa barang/jasa, dari Rp 0,- menjadi Rp 3.088.000,-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan dan pemeriksa Barang/Jasa	-	3.088.000	
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengajar	7.800.000	5.000.000	
5.2.1.01.05.	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta/Pelaksana Kegiatan	188.522.500	188.522.500	3) Honorarium pengajar, dari Rp 7.800.000,- menjadi Rp 5.000.000,-
5.2.1.03.	Uang Lembur	5.700.000	6.132.000	b. Pergeseran antar obyek belanja, pada jenis belanja barang dan jasa,
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.700.000	6.132.000	1) Belanja bahan pakai habis, dari Rp 14.551.000,- menjadi Rp 14.552.500,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.867.500	308.867.500	2) Belanja bahan/material, dari Rp 139.800.000,- menjadi Rp 132.450.500,-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.551.000	14.552.500	3) Belanja jasa kantor, dari Rp 300.000,- menjadi Rp 2.300.000,-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.201.000	4.202.500	4) Belanja perjalanan dinas, dari Rp 28.693.500,- menjadi Rp 32.665.500,-
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak	10.350.000	10.350.000	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.800.000	132.450.500	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000	4.800.000	
5.2.2.02.09.	Belanja bahan pakai habis alat kesehatan	135.000.000	127.650.500	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000	2.300.000	
5.2.2.03.04.	Belanja jasa pengumuman lelang	-	2.000.000	
5.2.2.03.13.	Belanja dekorasi	300.000	300.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	34.868.000	36.244.000	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	33.650.000	33.650.000	
5.2.2.06.02.	Belanja pengandaan	1.218.000	2.594.000	
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000	400.000	
5.2.2.07.02.	Biaya sewa gedung	400.000	400.000	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.255.000	90.255.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	45.255.000	45.255.000	
5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman tambahan	45.000.000	45.000.000	

1	2	3	4	5
5.2.2.15. 5.2.2.15.01. 5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.693.500 21.381.500 7.312.000	32.665.500 21.381.500 11.284.000	
1.15.01. 1.15.1.15.01.05.01.	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	20.000.000	20.000.000	Pergeseran antar obyek belanja, antara obyek belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja perjalanan dinas :
5.2.1. 5.2.1.01. 5.2.1.01.01. 5.2.1.01.04. 5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01. 5.2.2.01.09. 5.2.2.03. 5.2.2.03.13. 5.2.2.06. 5.2.2.06.02 5.2.2.07. 5.2.2.07.03. 5.2.2.08. 5.2.2.08.01. 5.2.2.11. 5.2.2.11.02. 5.2.2.15. 5.2.2.15.01.	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Transportasi dan Akomodasi peserta/pelaksana keg. Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja dokumentasi Belanja Jasa Kantor Belanja dekorasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja pengadaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.385.000 3.385.000 1.825.000 1.560.000 16.615.000 812.000 474.600 337.400 2.000.000 2.000.000 467.000 467.000 9.000.000 9.000.000 2.500.000 2.500.000 1.344.000 1.344.000 492.000 492.000 492.000	3.385.000 3.385.000 1.825.000 1.560.000 16.615.000 812.000 474.600 337.400 1.500.000 1.500.000 455.000 455.000 9.750.000 9.750.000 1.500.000 1.500.000 1.344.000 1.344.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000	1 Belanja jasa kantor, dari Rp 2.000.000,- menjadi Rp 1.500.000,- 2) Belanja cetak dan penggandaan, dari Rp 467.000,- menjadi Rp 455.000,- 3) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir dari Rp 9.000.000,- menjadi Rp 9.750.000,- 4) Belanja sewa sarana mobilitas, dari Rp 2.500.000,- menjadi Rp 1.500.000,- 5) Belanja perjalanan dinas, dari Rp 492.000,- menjadi Rp 1.254.000,-
1.20.05. 1.20.1.20.05.17.19.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Pajak Daerah dan PBB)	1.650.000.000	1.650.000.000	Pergeseran antar obyek belanja, antara obyek belanja sewa sarana mobilitas darat dengan obyek belanja perjalanan dinas :
5.2.1. 5.2.1.01. 5.2.1.01.01. 5.2.1.01.02. 5.2.1.01.05. 5.2.1.03. 5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan dan pemeriksa Barang/Jasa Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan Uang Lembur Uang Lembur PNS	810.202.000 745.522.000 112.920.000 2.340.000 630.262.000 64.680.000 64.680.000	810.202.000 745.522.000 112.920.000 2.340.000 630.262.000 64.680.000 64.680.000	1) Belanja sewa sarana mobilitas, dari Rp 0,- menjadi Rp 9.613.000,- 2) Belanja perjalanan dinas, dari Rp 340.495.000,- menjadi Rp 330.882.000,-

1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.798.000	839.798.000	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.779.000	5.779.000	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.779.000	5.779.000	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	321.600.000	321.600.000	
5.2.2.03.09.	Belanja jasa transaksi keuangan	310.000.000	310.000.000	
5.2.2.03.13.	Belanja dekorasi	11.600.000	11.600.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.640.000	104.640.000	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.625.000	98.625.000	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6.015.000	6.015.000	
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	9.613.000	
5.2.2.08.01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0	9.613.000	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.284.000	67.284.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	67.284.000	67.284.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.495.000	330.882.000	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	267.120.000	267.120.000	
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.375.000	63.762.000	
	- Koordinasi dengan Dispenda Propinsi	25.150.000	25.150.000	
	- Koordinasi ke Jakarta	48.225.000	38.612.000	
1.20.1.20.05.17.15.	Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang	60.000.000	60.000.000	Pergeseran antar obyek belanja,
	Pengelolaan Keuangan Daerah			antara obyek belanja bahan pakai habis,
5.2.1.	Belanja Pegawai	47.070.000	47.070.000	obyek belanja cetak dan penggandaan,
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.570.000	6.470.000	dan obyek belanja makanan dan minuman.
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.570.000	2.645.000	1) Belanja bahan pakai habis, dari
5.2.1.01.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Bintek	-	3.825.000	Rp 2.175.000,- menjadi Rp 597.000,-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.500.000	40.600.000	2) Belanja cetak dan penggandaan,
5.2.1.02.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber	40.500.000	40.600.000	dari Rp 1.800.000,- menjadi Rp 480.000,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.930.000	12.930.000	3) Belanja makanan dan minuman, dari
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000	597.000	Rp 8.955.000,- menjadi Rp 11.853.000,-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.175.000	597.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000	480.000	
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	1.800.000	480.000	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.955.000	11.853.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.955.000	11.853.000	
1.20.1.20.05.17.36.	Perata Usahaan Adms. Pengelolaan Keuangan Daerah	160.000.000	160.000.004	Pergeseran antar obyek belanja,
5.2.1.	Belanja Pegawai	46.017.000	46.017.004	antara obyek belanja bahan pakai habis,
5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.025.000	23.025.004	obyek belanja cetak dan penggandaan,
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.440.000	22.440.000	dan obyek belanja perjalanan dinas :

1	2	3	4	5
5.2.1.01.02. 5.2.1.03. 5.2.1.03.01. 5.2.1.03.02. 5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01. 5.2.2.06. 5.2.2.06.01. 5.2.2.06.02. 5.2.2.11. 5.2.2.11.02. 5.2.2.15. 5.2.2.15.02.	Honorarium Tim Pengadaan dan pemeriksa Barang/Jasa Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah	585.000 22.992.000 22.068.000 924.000 113.983.000 10.259.000 10.259.000 51.752.000 49.640.000 2.112.000 10.710.000 10.710.000 41.262.000 41.262.000 41.262.000	585.000 22.992.000 22.068.000 924.000 113.983.000 13.378.000 13.378.000 52.062.000 49.950.000 2.112.000 10.710.000 10.710.000 37.833.000 37.833.000 37.833.000	1) Belanja bahan pakai habis, dari Rp 10.259.000,- menjadi Rp 13.378.000,- 2) Belanja cetak dan pengandaan, dari Rp 51.752.000,- menjadi Rp 52.062.000,- 3) Belanja perjalanan dinas, dari Rp 41.262.000,- menjadi Rp 37.833.000,-
1.20.06. 5.1. 5.1.1. 5.1.1.01. 5.1.1.01.01. 5.1.1.01.02. 5.1.1.01.03. 5.1.1.01.05. 5.1.1.01.06. 5.1.1.01.07. 5.1.1.01.08. 5.1.1.01.09. 5.1.1.02. 5.1.1.02.06.	Badan Kepegawaian Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	11.431.184.000 11.067.794.000 9.110.555.034 111.025.395 187.525.000 1.506.570.000 86.334.300 27.312.727 13.110.754 25.360.790 363.390.000 363.390.000	11.431.184.000 11.207.274.000 7.946.749.540 751.000.000 192.745.000 1.346.405.000 649.051.200 109.000.000 723.260 211.600.000 223.910.000 223.910.000	Pergeseran antar rincian obyek pada obyek belanja gaji dan tunjangan, serta pergeseran antar obyek belanja, antara obyek belanja gaji dan tunjangan dan obyek belanja tambahan penghasilan PNS : 1) Gaji dan tunjangan, dari Rp 11.067.794.000,- menjadi Rp 11.207.274.000,- 2) Tambahan penghasilan PNS, dari Rp 363.390.000,- menjadi Rp 223.910.000,-
1.20.05. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.5.01. 5.1.5.01.51. 5.1.5.01.52.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bantuan Kemasyarakatan Lainnya Bantuan Untuk Pembangunan Insfrastuktur Sosial	88.076.644.000 368.688.000 887.500.000 39.365.775.000 29.240.775.000 500.000.000 260.000.000	88.076.644.000 368.688.000 887.500.000 39.365.775.000 29.240.775.000 760.000.000 -	Pergeseran antar rincian obyek belanja, antara rincian obyek belanja bantuan kemasyarakatan lainnya dengan bantuan untuk pembangunan insfrastuktur sosial, 1) Bantuan kemasyarakatan lainnya, semula Rp 500.000.000,- menjadi Rp 760.000.000,- 2) Bantuan untuk pembangunan insfrastuktur

1	2	3	4	5
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	972.596.000	972.596.000	sosial, semula Rp 260.000.000,- menjadi Rp 0,-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	41.482.085.000	41.482.085.000	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	
1.11.01. 1.11.1.11.01.02.09.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.184.000	39.184.000	Pergeseran antar rincian obyek belanja,
5.2.3.	Belanja Modal	39.184.000	39.184.000	antara rincian obyek belanja pengadaan
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.184.000	39.184.000	komputer/PC dengan belanja modal
5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	-	22.000.000	pengadaan CPU.
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.184.000	14.184.000	1) Belanja modal pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000	2.000.000	semula Rp 0,- menjadi Rp 22.000.000,-
5.2.3.12.07.	Belanja modal pengadaan CPU	22.000.000	-	2) Belanja modal pengadaan CPU,
5.2.3.12.08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000	1.000.000	semula Rp 22.000.000,- menjadi Rp 0,-
1.20.09. 1.20.1.20.09.02.09.	Kecamatan Adiwerna Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	Pergeseran antar obyek belanja,
5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	antara obyek belanja pengadaan komputer
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	16.450.000	dengan obyek belanja pengadaan
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	-	15.700.000	alat-alat studio :
5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	-	750.000	1) Belanja pengadaan komputer, dari Rp 0,-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.000.000	13.550.000	menjadi Rp 16.450.000,-
5.2.3.16.04.	Belanja modal pengadaan LCD Proyektor	30.000.000	1.750.000	2) Belanja pengadaan alat-alat studio, dari
	- Belanja persiapan dan administrasi	1.750.000	10.800.000	Rp 30.000.000,- menjadi Rp 13.550.000,-
	- Pengadaan LCD Proyektor	28.250.000	1.000.000	
	- Pengadaan LCD Screen	-	-	
1.20.26. 1.20.1.20.26.02.09.	Kecamatan Warureja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.400.000	47.400.000	Pergeseran antar obyek belanja,
5.2.3.	Belanja Modal	47.400.000	47.400.000	antara obyek belanja pengadaan komputer
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000	6.500.000	dengan obyek belanja pengadaan
5.2.3.11.21.	Belanja modal pengadaan podium/mimbar	3.500.000	3.500.000	alat-alat studio :
5.2.3.11.23.	Belanja modal pengadaan panggung ruang pertemuan/ background aula	3.000.000	3.000.000	1) Belanja modal pengadaan komputer, dari
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.500.000	13.280.000	Rp 30.500.000,- menjadi Rp 13.280.000,-
5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000	-	2) Belanja modal pengadaan alat-alat studio,

1	2	3	4	5
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book - Biaya persiapan dan administrasi - Pengadaan komputer note book	22.100.000 1.660.000 20.440.000	11.880.000 1.660.000 10.220.000	dari Rp 8.900.000,- menjadi Rp 26.120.000,-
5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	1.000.000	1.000.000	
5.2.3.12.08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	400.000	400.000	
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.900.000	26.120.000	
5.2.3.16.04.	Belanja modal pengadaan LCD Proyektor	-	17.220.000	
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan home theater	8.900.000	8.900.000	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000	1.500.000	
5.2.3.17.01.	Belanja modal pengadaan telepon	1.500.000	1.500.000	
1.01.1.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
1.01.1.01.16.135.	Pengendalian Kegiatan Bantuan Propinsi Tahun 2009			
5.2.1.	Belanja Pegawai	66.500.000	66.500.000	Pergeseran antar jenis belanja,
5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.682.500	27.387.500	antara jenis belanja pegawai dengan
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.602.500	10.827.500	jenis belanja barang dan jasa :
5.2.1.03.	Uang Lembur	13.602.500	10.827.500	a) Belanja pegawai, dari Rp 26.682.500,-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13.080.000	16.560.000	menjadi Rp 27.387.500,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.817.500	39.112.500	b) Belanja barang dan jasa, dari Rp 39.817.500,-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.162.750	9.888.750	menjadi Rp 39.112.500,-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.124.750	8.766.750	
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/igas sarana mobilitas	3.888.000	972.000	
5.2.2.01.09.	Belanja dokumentasi	150.000	150.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.291.750	2.291.750	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	487.500	487.500	
5.2.2.06.02.	Belanja pengadaan	1.804.250	1.804.250	
5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman	7.039.000	6.874.000	
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian	2.145.000	1.980.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	544.000	544.000	
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman lembur	4.350.000	4.350.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.324.000	20.058.000	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.424.000	2.340.000	
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.900.000	17.718.000	
1.01.1.01.16.105.	Pengendalian Rehab.Sedang/Berat Ruang Kelas/Gdng			
5.2.1.	Belanja Pegawai	80.000.000	80.000.000	Pergeseran antar jenis belanja,
5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.374.000	46.737.000	antara jenis belanja pegawai dengan
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000	20.565.000	jenis belanja barang dan jasa :

1	2	3	4	5
5.2.1.03.	Uang Lembur	24.624.000	26.172.000	a) Belanja pegawai, dari Rp 48.374.000,- menjadi Rp 46.737.000,-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	24.624.000	26.172.000	b) Belanja barang dan jasa, dari Rp 31.626.000,- menjadi Rp 33.263.000,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.626.000	33.263.000	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.901.400	21.122.900	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.961.400	19.653.900	
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas	2.340.000	819.000	
5.2.2.01.09.	Belanja dokumentasi	300.000	500.000	
5.2.2.01.13.	Belanja jasa kantor	300.000	150.000	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.228.600	3.496.100	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	605.000	810.000	
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	2.623.600	2.686.100	
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000	-	
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000	-	
5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman	6.572.000	3.730.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.572.000	3.730.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.424.000	4.914.000	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.424.000	4.914.000	
1.01.1.01.18.15.	Transport Tutor PAUD Non Formal (Bantuan Provinsi)	150.000.000	150.000.000	
5.2.1.	Belanja Pegawai	141.997.500	150.000.000	Pergeseran antar jenis belanja, antara jenis belanja pegawai dengan jenis belanja barang dan jasa :
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.137.500	-	a) Belanja pegawai, dari Rp 141.997.500,- menjadi Rp 150.000.000,-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.137.500	-	b) Belanja barang dan jasa, dari Rp 8.002.500,- menjadi Rp 0,-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.000.000	150.000.000	
5.2.1.02.03.	Belanja transportasi dan akomodasi	140.000.000	150.000.000	
5.2.1.03.	Uang Lembur	860.000	-	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	860.000	-	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.002.500	-	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.242.500	-	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.242.500	-	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	-	
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	150.000	-	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.610.000	-	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.610.000	-	
1.19.1.19.	Kantor Kesbangpol Dn dan Limmas	3.500.000.000	-	
1.19.1.19.01.21.08	Pengendalian Pengamanan Pemilu Tahun 2009	3.122.530.000	-	Pergeseran penyesuaian program/kegiatan
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.122.530.000	-	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.470.000	-	

1	2	3	4	5
1.19.1.19.01.23.01.	Cipta Kondisi Ketentraman dan Ketertiban dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009	-	3.500.000.000	Pergeseran penyesuaian program/kegiatan
5.2.1.	Belanja Pegawai	-	2.179.330.000	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	1.320.670.000	
1.02.1.02.01.16.30.	Kegiatan Dari Dana Bagi Hasil Cukai Pemeliharaan & Pemulihan Kesh. Akibat Dampak Rokok	440.000.000	3.084.378.000	Pergeseran Penambahan program/kegiatan
1.02.1.02.01.16.31.	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan	-	146.000.000	
1.02.1.02.01.23.07.	Untuk Penderita akibat rokok	-	104.000.000	
1.06.1.06.01.21.24.	Penetapan Puskesmas & RS sbg Kaw. bebas asap rokok	-	25.000.000	
1.08.1.08.01.20.09.	Peny. Renc. & Pengend. Prog/Keg. DBHC	-	80.000.000	
1.08.1.08.01.20.10.	Penanganan Perserapan dan Sanitasi Lingkungan	-	210.000.000	
1.12.1.11.01.18.08.	Pemantauan Masyarakat Sekitar Pabrik Rokok	-	40.000.000	
1.11.1.11.01.18.08.	Pemantauan Kualitas Limbah dan Lingk.Indust.Rokok	-	75.000.000	
1.14.1.13.01.16.10.	Fasilitas Kelkutsertaan Dalam ber-KB bagi Buruh/Karyawan Industri Rokok	-	75.000.000	
1.14.1.13.01.16.11.	Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin	-	75.000.000	
1.14.1.13.01.17.14.	Pembinaan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil di Wil Industri dan Penghasil Tembaku/Cengkeh	-	50.000.000	
1.15.1.15.01.16.12.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencaker di Wil Industri dan Penghasil Tembaku/Cengkeh	-	425.000.000	
1.15.1.15.01.16.13.	Industri dan Penghasil Tembaku/Cengkeh	-	75.000.000	
1.20.1.20.03.02.05	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	25.000.000	
1.20.1.20.03.02.05	Fasilitas Pembentukan Koperasi	-	375.000.000	
1.20.1.20.03.20.22	Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif	-	264.378.000	
1.20.1.20.03.20.23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	100.000.000	
1.20.1.20.05.17.34	Monitoring evaluasi pelak.DBHCDDT	-	50.000.000	
1.20.1.20.05.17.35	Sarana Penunjang Kesekretariatan DBHCDDT	200.000.000	200.000.000	
1.20.1.20.00.5.1.5	Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai	160.000.000	160.000.000	
2.01.2.01.01.02.09	Pemberantasan Cukai Ilegal	-	125.000.000	
2.01.2.01.01.15.10.	Belanja Bantuan Sosial	-	53.326.500	
2.01.2.01.01.15.11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	43.119.500	
2.06.2.07.01.19.09	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua	-	203.554.000	
2.06.2.07.01.19.10	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	75.000.000	
2.07.2.07.01.19.06	Pembinaan Organisasi PKL Rokok	-	25.000.000	
2.07.2.07.01.19.07	Operasional Bantuan Modal Klpk Pedagang Asongan Bant.Pembinaan Lingk.Sosial Kawasan Pabrik Rokok	30.000.000	-	
	Pemetaan Industri Rokok	50.000.000	80.000.000	

1	2	3	4	5
1.20.04.	Sekretariat DPRD			
1.20.1.20.04.03.02.	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Perlengkapannya			
5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000.000	600.000.000	Pergeseran antar obyek belanja, antara obyek belanja jasa kantor, obyek belanja pakaiian dinas dan atributnya, dan obyek belanja perjalanan dinas : 1) Belanja jasa kantor, dari Rp 1.883.500,- menjadi Rp 8.627.000,- 2) Belanja pakaiian dinas dan atributnya, dari Rp 156.950.000,- menjadi Rp 146.000.000,- 3) Belanja perjalanan dinas, dari Rp 2.800.000,- menjadi Rp 7.006.500,-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.022.500	6.022.500	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000	2.400.000	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa	3.622.500	3.622.500	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	593.977.500	593.977.500	
5.2.2.03.	Belanja jasa kantor	1.883.500	8.627.000	
5.2.2.03.04.	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	1.883.500	1.883.500	
5.2.2.03.21.	Belanja jasa pemeriksaan/penguji specimen	-	6.743.500	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000	670.000	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	70.000	70.000	
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	600.000	600.000	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	324.000	324.000	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	324.000	324.000	
5.2.2.12.	Belanja Pakaiian Dinas dan Atributnya	156.950.000	146.000.000	
5.2.2.12.04.	Belanja atribut	156.950.000	146.000.000	
5.2.2.13.	Belanja Pakaiian Kerja	421.350.000	421.350.000	
5.2.2.13.01.	Belanja pakaiian kerja lapangan	421.350.000	421.350.000	
5.2.2.14.	Belanja pakaiian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000	10.000.000	
5.2.2.14.04.	Belanja pakaiian olah raga	10.000.000	10.000.000	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000	7.006.500	
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000	7.006.500	

BUPATI TEGAL,



AGUS RYANTO